

Resolusi Jihad NU; Aktualisasi Semangat Nasionalisme Keagamaan para Ulama

Mohammad Fajrul Falaakh

BANYAK peristiwa yang kemudian menjadi saat peringatan bersejarah dan berskala nasional di Indonesia. Kelahiran Budi Utomo tanggal 20 Mei misalnya, diperingati sebagai *Hari Kebangkitan Nasional* dan pertempuran 10 November di Surabaya dinyatakan sebagai *Hari Pahlawan*.

Lepas dari penilaian skala, ada satu peristiwa bercorak keagamaan yang nampaknya telah dilupakan berbilang tahun. Padahal peristiwa tersebut bermakna dalam bagi sebagian besar bangsa Indonesia serta memiliki arti penting dalam sejarah kemerdekaan negeri ini.

Dua bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 20 Oktober 1945, sekelompok ulama' yang tergabung dalam *Jmi'iyah Nahdlatul Ulama* berembung di Surabaya. Pertemuan para konsul se-jawa tersebut membahas persoalan-persoalan yang mutakhir bangsa dan negara yang sedang terlibat dalam kancah revolusi kemerdekaan. Masalah penting yang dibicarakan saat itu ialah sikap dan perbuatan NU terhadap nacaman agresi Belanda yang dengan membonceng tentara Sekutu (Inggris) hendak mengoyak keutuhan negara proklamasi (Lih. Saifuddin Zuhri, *Peranan NU dalam pengembangan Islam dan membela Tanah Air* makalah, 1980).

Keputusan penting hasil pertemuan tersebut ialah 'mewajibkan warga NU khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk membela Tanah Air dan melawan musuh yang akan menghancurkan negara Indonesia'. Secara lengkap para ulama menetapkan keputusan berikut ini pada tanggal 22 Oktober 1945, (Lih. Slamet Effendy Yusuf dkk, *Dinamika Kum Santri*, 1983: 38).

Pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan; *kedua*, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah yang sah wajib dibela dan diselamatkan; *ketiga*, musuh Republik Indonesia, terutama yang datang membonceng tugas-tugas tentara Sekutu (Inggris) dalam masalah tawanan bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia; *keempat*, umat Islam terutama Nahdlatul Ulama wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia; *kelima*, kewajiban tersebut adalah suatu *jihad* yang menjadi kewajiban tiap-tiap orang Islam (*fardlu 'ain*) yang berada pada jarak radius 94 kilometer (jarak dimana umat Islam diperkenankan sembahyang *jama'* dan *qashar*). Adapun mereka yang diluar jarak tersebut berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak radius 94 kilometer tersebut.

Keputusan yang didahului *fatwa* KH Hasyim Asy'ari selaku *Rais Akbar* NU itu dikenal dengan nama *Resolusi Jihad NU*. Yang kemudian nampak dari resolusi tersebut ialah bahwa para ulama telah memberi penilaian keagamaan yang suci terhadap negara Indonesia, sehingga upaya membela dan mempertahankan negara perlu dilakukan dengan meneteskan darah kematian umat Islam. Ini berarti bahwa NU telah menyediakan diri secara habis-habisan bagi negara tercinta dan tampil dengan perkasa dalam sejarah republik ini. Dan keanggunan serta kesucian itu justru diperagakan oleh para ulama yang saat itu santer dijuluki tradisional, ortodoks, kolot dan bersarung kumuh.

Tapi semua tak menghalangi tampilnya sosok-sosok pejuang dan pengabdian Tanah Air. Bahkan resolusi tersebut, meski bukan satu-satunya, tak berlebihan jika dinyatakan telah membakar semangat ribuan pemuda dan lasykar-lasykar rakyat, sehingga umat dan bangsa ini bangkit melawan musuh diberbagai tempat. *Palangan Ambarawa, Bandung Lautan Api, Pertempuran 10 November Surabaya* tak sepi dari kehadiran barisan *Hizbullah* (dipimpin KH Zainul Arifin, konsul NU Jakarta), *Sabilillah* (dipimpin KH Masykur, Konsul NU Malang) dan kekuatan nasional lainnya. Tak tertinggal pula peran pesantren sebagai markas mobilisasi dan logistik, dan KH *Abdul Wahab Hasbullah* (tokoh pendiri dan rais aam ke -2 NU) pada usia menjelang 60 tahun sempat melakukan konsolidasi dan mobilisasi barisan para kyai melalui *Mujahiddin*. Perlawanan yang heroik tersebut tak lepas pula dari liputan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* (Lih. Slamet Effendy Yusuf dkk, *Dinamika Kum Santri*, 1983: 36-37).

Para ulama memang tak pernah absen dari dinamika kehidupan politik membela Tanah Air. Alasan untuknya jelas dapat disimak dari ajaran Islam yang mendorong dan merangsang umat agar melalui politik dapat mengabdikan kepada Allah dan kepentingan kemanusiaan, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu tak aneh bila hingga kini para ulama masih bergairah membicarakan masalah politik, sebab menyadari bahwa hal itu berpengaruh dalam penegakkan dan penerusan nilai-nilai ilahiyah kepada generasi penerus. Keterlibatan ini tentu didasari oleh ketakwaanya kepada Allah.

Dalam banyak hal nampak ajaran Islam dapat menghembuskan semangat keagamaan pada masalah kenegaraan. Satu contoh, nasionalisme, ternyata bukan persoalan yang harus ditolak oleh Islam. Sebaliknya Islam bukan tak berperan terhadapnya (Lih Said Ramadhan, *Islam dan Nasionalisme*, terj. 1969). Islam tak sesempit yang diduga dan dipaksakan berlaku dalam kehidupan sehari-hari melalui anggapan bahwa ia hanya mengatur hubungan ritual manusia dengan Allah. Lebih dari itu Islam mengatur hubungan antar manusia, antara pribadi dengan masyarakat dan antara masyarakat satu sama lain. Alam kaitan dengan masyarakat, posisi seseorang telah mengharuskannya berperanserta secara aktif membina kehidupan masyarakat.

Karena itu upaya melindungi atau membela Tanah-air merupakan keberperansertaan seseorang dalam masyarakatnya. Tak pelak lagi ajaran 'cinta tanah-air adalah sebagian dari iman' (*hubbul wathan minal iman*) merupakan motivasi umat Islam untuk mengorbankan diri bagi negara. Dengan demikian tak mengherankan pula bila pada banyak kesempatan umat Islam tampil dalam pergerakan kepejuangan bangsa. KH *Subkimusyasyar* NU Jateng (semacam konsultan) misalnya, pada usia sekitar 80 tahun (waktu itu) tak tertinggal memberi andilnya. Dari daerah sejuk *Parakan* disusupkannya kalimat-kalimat ilahiyah dan semangat kepahlawanan di dada para pemuda dan lasykar rakyat melalui doa pemantapan : *Bismillahi Allahu Akbar/Allahu ya Hafidzu, ya Hafidzu, ya Hafidzu/Bi'aunillah Allahu Akbar* (Lih Saifuddin Zuhri; *Kalaideskop Politik di Indonesia*, jil. 2, 1981: 10-13).

Kisah lain dari zaman pendudukan Jepang menampilkan nama-nama KH Hasyim Asy'ari dan KH Zainal Musthafa. Yang pertama, selaku rais akbar NU, secara terbuka menentang *saikerei* (upacara membungkukkan badan ke arah Tokyo sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang). Seperti semua orang Islam, Kyai Hasyim menilainya *syirik* (perbuatan menyekutukan Allah) dan menolaknya, sehingga Jepang menjebloskannya ke penjara. Yang kedua, seorang anggota NU

Singaparna Jawa Barat, bahkan mengangkat senjata melawan Jepang (suatu perlawanan senjata pertama kali kepada Jepang). Hasilnya, meski dapat dipadamkan, dapat turut merubah kebijaksanaan Jepang terhadap Islam. Tak lama sesudah itu pembekuan NU dan Muhammadiyah dicairkan (Lih Selamet effendy Yusuf dkk, *loc cit*).

Islam di Indonesia, pun banyak di belahan dunia, tak lepas dari peran mempersatukan suku-suku bangsa menjadi kekuatan nasional yang kokoh. Tidak lain karena Islam telah dapat menaburkan benih-benih nasionalisme. Istilah lain untuknya (menurut Bernhard Dahm sebagai dikutip Zamarkasyi Dhofier, *Prisma*, 1/1984: 75-76) ialah *protonationalism*. Begitulah NU, dengan watak yang selalu bertumpu kepada kekokohan wawasan keagamaan yang membudaya dan keterikatan terhadap nasib Tanah Air menyebabkan perilaku politiknya tak lepas dari upaya mengaktualisasikan corak nasional yang dilandasi oleh amanat keagamaan. Itupun tak lain karena upaya menterjemahkan keterikatan NU terhadap *aqidah Islam ala ahlussunnah wal jama'ah*.

Kini, yang perlu dilakukan ialah menangkap dan menghirup ruh Islam dan nafas jihad secara cermat serta menterjemahkannya ke dalam aksi nyata secara tepat. Berarti *ketauhidan* dan *kesyahidan (martyrdom)* perlu ditanamkan kepada dan dibangkitkan dari diri umat generasi penerus. Namun untuk itu perlu kedalaman kerangka rujukan agar tak terjadi penyimpulan yang gegabah dan salah. Universalitas ajaran Islam tak harus membuahakan generalisasi berbagai masalah, melupakan konteks situasional dan kondisional. Dengan demikian cita-cita *izzul Islam al muslimin* (kejayaan Islam dan umatnya) yang tak mustahil terwujud di bumi Indonesia akan penuh dengan taburan *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Semoga. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 26/10/1984)